

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rustiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Marpuji dkk. 1990. *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*. Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alkostar, Artidjo. 1984. *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta: Rajawali.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2020. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2016*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramdlon, Naning. 1983. *Problema Gelandangan dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*. Bandung: Armico.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*.

Jakarta : Sinar Harapan.

- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Skripsi

- Damayanti, Welda. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Durani. 2013. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Illegal Logging di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hutapea, Daniel. 2017. *Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Lingkungan Hidup di Kota Medan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Farihah, Ita. 2019. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Firdausi, Himami. 2018. *Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dan Ulama' Syafi'iyah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Maniawasi, Ferdinand. 2018. *Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd". Yogyakarta.

- Nurul, Azizah. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Praharani, Mei, Maesaroh dan Titik Djumiarti. *Analisis Pengembangan Strategi Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rusdiani, Atik. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen Pai Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen Pai Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)*. Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Sahar, Muhammad. 2015. *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Saifuddin, Ahmad. 2017. *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus*. Thesis. IAIN Kudus.
- Yonatan, Gehard. 2017. *Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Jurnal

- Abdul Syani dan Isma Riskawati. 2013. *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*. *Journal Sociologie*, Vol. 1, No. 1.
- Achjani, Eva. *Menelaah Arti Hak untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 3 , No. 1.
- Ahmad, Maghfur. 2010. *Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Ilmiah, STAIN Pekalongan Vol. 7 No.2.
- Anasiru, Ronawaty. 2011. *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar*. Jurnal Sosiokonsepsia. Vol. 16, No. 02.
- Darmawan. 2006. *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan untuk Indonesia*. Jurnal Politika.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. 2019. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31, No. 2.
- Fitri, Ifni Amanah. 2019. *Penanggulangan Gelandangan dan pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti Di Kota Malang, Kota Padang*

- Dan Jeneponto*). Social Work Journal. Vol. 9, No. 1,
- Fuadi, Ariza. 2015. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 5, No. 1.
- Hadiyono. 2020. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1, No. 1.
- Rofieq, Ainur. 2011. *Pelayanan Publik dan Welfare State, Governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2, No. 1.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol. Vol. 2, No. 1.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, 1945, *Undang Undang Dasar 1945*
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039)
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Rehabilitasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

Website

Portal Kompas.com, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>, diakses pada 31 September 2021.

Portal Kompas.com, diakses dari

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/29/06542911/warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis-dan-pengamen-bisa-dipenjara?page=all>, diakses pada 30 September 2021.

Portal Kompas.com, diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/30/163614678/gelandangan-dan-pengemis-makin-banyak-satpol-pp-ada-yang-kerja-di-spa?page=all>, diakses pada 1 Oktober 2021.

Portal Ngerti Hukum.com, diakses dari

<https://ngertihukum.id/menangani-peningkatan-pengemis-dan-gelandangan-di-masa-pandemi/>, diakses pada 30 September 2021.

Renata, H.K. Agus Sutini. 1993. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Dasar di Indonesia. Digital library Universitas Katolik Indonesia atmajaya.

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=26827>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.